



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

Jabatan : **BUPATI BALANGAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Paringin, 18 September 2024


BUPATI BALANGAN,
H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

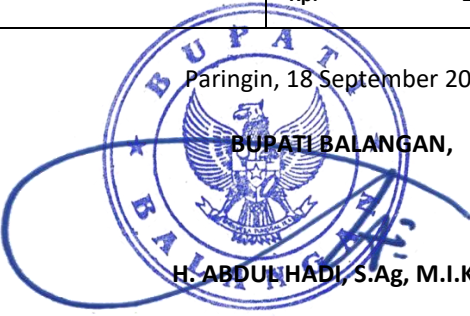
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	6,57	3,16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,53	4,38	
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	2,35	3,45	
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	7,45	6,96	
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	53,61	51,13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,89	73,89	Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	8,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	12,98	
5.	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran Perkapita	1.341.267	1.109.546	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Penanggung Jawab
					Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini Rasio	0,285	0,258	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Sekretariat Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	2,37	2,37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	74,40 (BB)	74,40 (BB)	Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi; dan Seluruh SKPD
		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Inspektorat.
		Nilai EKPPD	3,593	3,593	Sekretariat Daerah dan Seluruh SKPD
		Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51 (A)	4,51 (A)	Sekretariat Daerah dan UPP
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	Sekretariat Daerah dan UPP
9.	Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	Indeks Desa Membangun	0,6795	0,7997	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 1.154.410.500
2.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 106.805.200
3.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 7.270.306.500
4.	Pengembangan UMKM	Rp. 2.760.930.000
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 13.836.978.700
6.	Pengembangan Ekspor	Rp. 2.569.134.000
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 51.500.000
8.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 276.750.000
9.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.172.019.100
10.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 744.252.700
11.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 124.507.018.281
12.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 23.730.181.050
13.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 1.523.934.700
14.	Penyuluhan Pertanian	Rp. 12.631.368.200
15.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 42.889.294.194
16.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 69.848.887.750
17.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 87.035.446.495
18.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 689.944.100
19.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 2.400.539.662
20.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 12.218.112.608
21.	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 78.747.200
22.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 4.843.407.300
23.	Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.048.458.900
24.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 2.172.982.300
25.	Pengembangan Kebudayaan	Rp. 3.988.940.000
26.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 5.949.498.500
27.	Pembinaan Sejarah	Rp. 3.063.081.400
28.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 3.235.134.600
29.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 320.622.000
30.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 661.209.000
31.	Promosi Penanaman Modal	Rp. 521.783.700
32.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 147.695.000
33.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 45.606.020.271
34.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 165.705.719.700
35.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 241.194.974.600
36.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 6.829.269.500
37.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.210.533.240
38.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.499.730.200
39.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 23.318.050.000
40.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 32.171.292.200
41.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 229.667.623.192
42.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.097.827.400

No	Program	Anggaran
43.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.526.762.390
44.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 14.981.795.000
45.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 3.314.814.600
46.	Pengendalian Penduduk	Rp. 7.026.285.800
47.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 1.090.621.200
48.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.451.592.950
49.	Pengelolaan Pendidikan	Rp. 259.035.969.790
50.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 4.496.361.400
51.	Pembinaan Perpustakaan	Rp. 4.873.079.300
52.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 66.330.000
53.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.457.909.800
54.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 23.974.668.200
55.	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 248.931.396.600
56.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 41.017.418.328
57.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 1.092.719.700
58.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 16.721.392.000
59.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 7.785.258.400
60.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 15.121.159.100
61.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 13.419.728.200
62.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.062.286.500
63.	Penanganan Bencana	Rp. 1.607.329.800
64.	Penanggulangan Bencana	Rp. 13.933.888.460
65.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 4.705.464.400
66.	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 32.718.000
67.	Hubungan Industrial	Rp. 10.648.154.900
68.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 142.799.186.565
69.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.108.355.000
70.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.881.460.400
71.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.364.356.400
72.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.816.002.600
73.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 517.236.357.461
74.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 11.389.027.600
75.	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 36.313.953.300
	JUMLAH	Rp. 2.621.034.218.087


 Paringin, 18 September 2024
BUPATI BALANGAN,
H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom